



Fungsi Dinas Pariwisata dalam Pengelolaan Wisata di Kecamatan Sambi Rampas

Yosef Franklin Estrada ^{1*}, Josef Mario Monteiro ², Marlyani Anita Seran ³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: efranklin177@gmail.com ^{1*}, josefmonteiro@staf.undana.ac.id ², seranmarlyani@yahoo.co.id ³

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: efranklin177@gmail.com

Abstract Tourism is one of the strategic fields to obtain foreign exchange and support national and regional development. Indonesia has a rich diversity of tourist destinations, spread across the country. One of the regions famous for its beautiful and attractive tourist destinations is East Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province (NTT). This regency has various tourist destinations that attract attention and have unique characteristics. Currently, the focus of the community, particularly the people of East Manggarai Regency, is on the Watu Pajung Beach and Rana Tonjong Lake tourist destinations in Nanga Mbaur and Nanga Mbaling villages, Sambi Rampas sub-district. Considering its potential to increase regional income, this destination is specifically regulated through the East Manggarai Regency Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning the management of the Watu Pajung Beach and Rana Tonjong Lake tourism area. This research uses empirical juridical methods, collecting data through interviews, observations, and literature studies. The results of the study show that the implementation of the function of the East Manggarai Regency Tourism Office has shown an increase, but it is not yet optimal. Based on field experience and information obtained, the researcher can provide suggestions and input, namely: The Tourism Office must be more serious in overcoming the obstacles of managing the Watu Pajung Beach and Rana Tonjong Lake tourism to achieve optimal results, and the Local Government supports with larger budget assistance so that the management of tourist destinations is smoother.

Keywords: Tourism, Management, Tourism Office, East Manggarai

Abstrak Pariwisata merupakan salah satu bidang yang strategis untuk memperoleh devisa dan mendukung pembangunan nasional dan daerah. Indonesia memiliki kekayaan destinasi pariwisata yang beragam dan unik, tersebar di seluruh wilayah. Salah satu daerah yang terkenal akan destinasi pariwisata yang indah dan menarik adalah Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kabupaten ini memiliki berbagai destinasi pariwisata yang menarik perhatian dan memiliki keunikan tersendiri. Saat ini, yang menjadi pusat perhatian masyarakat, terkhusus masyarakat Kabupaten Manggarai Timur pada umumnya yaitu destinasi wisata Pantai Watu Pajung dan Danau Rana Tonjong di Desa Nanga Mbaur dan Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas. Mengingat potensinya untuk meningkatkan pendapatan daerah, destinasi ini diatur secara khusus melalui Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang pengelolaan kawasan pariwisata Pantai watu Pajung dan danau Rana Tonjong. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur telah menunjukkan peningkatan, namun belum optimal. Berdasarkan pengalaman di lapangan dan informasi yang diperoleh, kiranya peneliti dapat memberikan saran dan masukan, yaitu: Dinas Pariwisata harus lebih serius dalam mengatasi kendala pengelolaan pariwisata Pantai Watu Pajung dan Danau Rana Tonjong untuk mencapai hasil optimal, serta Pemerintah Daerah mendukung dengan tunjangan dana yang lebih besar lagi agar pengelolaan destinasi wisata lebih lancar.

Kata Kunci: Pariwisata, Pengelolaan, Dinas Pariwisata, Manggarai Timur

1. LATAR BELAKANG

Pariwisata Indonesia telah mengalami perkembangan pesat sejak awal mula hingga saat ini, fungsi kepariwisataan seperti yang dicantumkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yakni memiliki fungsi bagi peningkatan pemasukan Negara untuk merealisasi kemakmuran masyarakat. Berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. A.J Burkat mengemukakan bahwa Pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat di mana mereka biasa hidup dan bekerja dan juga kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di suatu tempat tujuan.¹

Pengelolaan pariwisata di suatu tempat tujuan wisata memang harus didasarkan pada program-program ataupun rancangan, pengembangan, ataupun penyelenggaraan yang tepat dan jelas dalam mengelolainya supaya semua kemampuan dan potensi yang terdapat di suatu tempat tujuan wisata perlu diberdayakan secara optimal dan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pengembangan dan pengelolaan dalam bidang kepariwisataan tentunya tidak terlepas dari peran swasta (usaha), tokoh adat (budaya) dan pihak pejabat Pemerintah sendiri. Destinasi atau Objek wisata yang terkenal di Kabupaten Manggarai Timur, diantaranya adalah Objek Wisata Danau Rana Mese, Pantai Cepi Watu, Lembah Colol (Kopi Colol), Liang Bala, Nanga Rawa, Pantai Watu Pajung dan Rana Tonjong. Saat ini yang menjadi pusat perhatian banyak orang, terkhusus masyarakat Manggarai Timur pada umumnya adalah Destinasi wisata Pantai Watu Pajung dan Danau Rana Tonjong yang terletak di Desa Nanga Mbaur dan Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas.

Pantai Watu Pajung yang terletak di Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambu Rampas memiliki keunikan karena Pasir putih yang luas dengan beberapa formasi Batu karang yang kokoh berdiri di tepi Pantai, dihiasi dengan perbukitan hijau yang ditumbuhi Pepohonan. Daerah sekitar Pantai ini masih berupa kawasan Hutan dan Padang Rumput alami. Di dalam kawasan Hutan ini, terdapat juga habitat bagi Kadal raksasa Komodo Flores yang disebut *Rugu* dalam bahasa setempat. Perairan di Pantai Watu Pajung umumnya tenang, cocok untuk berbagai aktivitas seperti berenang, *snorkeling*, dan *diving*.² Selain Pantai Watu Pajung, terdapat juga Rana Tonjong yang terdapat di Desa Nanga Mbaling dan menjadi destinasi wisata alam menarik di Kabupaten Manggarai

¹ Rohmawati, Enny, Skripsi: *Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 tahun 2014 tentang standar usaha pondok pariwisata pada syariah guest house perspektif masalah: Study syariah guest house di Malang*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), hlm. 23.

²<https://www.jurnalflores.co.id/travel/7768379810/review-wisata-alam-rana-tonjong-hingga-watu-pajung-di-manggarai-timur-ntt>

Timur. Danau Rana Tonjong memiliki keunikan karena ditumbuhi Bunga Teratai raksasa (*Victoria Amazonica*) atau disebut *Tonjong* dalam bahasa setempat. Tumbuhan ini menutupi seluruh permukaan Danau yang memiliki tidak tampak adanya air pada permukaan Danau. Bunga Teratai ini tumbuh subur sepanjang tahun. Keunikan lain yang dimiliki yaitu di dalam bunga yang sudah mekar terdapat biji-bijian seukuran kacang tanah yang dapat dimakan mentah atau dimasak terlebih dahulu. Melihat berbagai keunikan tersebut Danau Rana Tonjong seringkali dikunjungi oleh Wisatawan dan bahkan menjadi salah satu ikon keunikan pariwisata di Kabupaten Manggarai Timur.

Mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015 sampai 2025, Kecamatan Sambi Rampas merupakan salah satu kawasan Pariwisata yang masuk dalam konsep arah kebijakan pembangunan yang harus dikelola dengan baik agar daya tarik wisata meningkat. Kawasan Pariwisata Pantai Watu Pajung dan Danau Rana Tonjong memiliki keunikan daya tarik wisata yang bernilai jual tinggi, sehingga perlu dikelola secara baik agar dapat memberi dampak positif bagi pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata tepatnya di Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan Nasional, rencana induk kepariwisataan Provinsi, dan rencana induk kepariwisataan Kabupaten. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata tersebut menjelaskan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota.³ Semenjak Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 tahun 2016 tentang Pengelolaan Kawasan Pantai Watu Pajung dan Rana Tonjong ditetapkan, memang sejauh ini pengelolaan terhadap kawasan pariwisata tersebut sudah terlihat peningkatannya, namun belum mencapai hasil yang optimal yang tidak diketahui penyebabnya, bahkan masih banyak Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur yang belum tahu tentang keberadaan dan keunikan wisata Pantai Watu Pajung dan Rana Tonjong.

³ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang *Kepariwisata* Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3)

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris yaitu yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. tempat atau daerah yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat untuk mengumpulkan data lapangan, untuk menemukan jawaban terhadap masalah.⁴ Aspek yang diteliti pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur, di Desa Nanga Mbaur yakni lokasi wisata Pantai Watu Pajung, dan Desa Nanga Mbaling yakni lokasi wisata Danau Rana Tonjong.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yakni wawancara, observasi, dan studi kepustakaan/dokumen. Dimana data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi akan diakurasi dengan adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan **dapat** berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum **tersier**, setelah itu dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan atau menguraikan data untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif dengan memberikan penafsiran yang logis dan benar sesuai dengan fakta yang ada dan atau serta kaidah hukum yang terkait permasalahan penelitian ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Watu Pajung Dan Danau Rana Tonjong Di Desa Nanga Mbaur Dan Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas

Fungsi merupakan sesuatu yang merujuk pada peran spesifik yang dimainkan oleh setiap bagian atau individu dalam mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Fungsi ini yang saling melengkapi, di mana setiap bagian memiliki peran penting dalam membentuk gambar yang utuh. Tujuan utama fungsi adalah efisiensi, efektivitas, koordinasi, dan kontinuitas. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti “Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Watu Pajung Dan Danau Rana Tonjong Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kawasan Pariwisata Pantai Watu Pajung Dan Danau Rana Tonjong”.

⁴ Monteiro, *Josef Mario. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Malang: Setara Press, 2023), hlm. 43

Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Watu Pajung Dan Danau Rana Tonjong Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kawasan Pariwisata Pantai Watu Pajung Dan Danau Rana Tonjong.

- **Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pariwisata**

Upaya implementasi kebijakan teknis bidang pariwisata, khususnya di kawasan wisata Pantai Watu Pajung dan Danau Rana Tonjong, telah dilakukan secara aktif, namun masih terdapat beberapa kendala yang menghambat optimalisasi kebijakan tersebut, yakni: keterbatasan kapasitas sumber daya manusia seperti kurangnya pelatihan dan pengalaman dapat menghambat implementasi kebijakan teknis bidang pariwisata, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pariwisata dan kebijakan teknis yang terkait dapat menghambat partisipasi dan dukungan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, pihak Dinas Pariwisata telah melakukan berbagai upaya, seperti mendorong semua pihak terkait untuk mengikuti kebijakan, melakukan konsultasi dengan pemerintah Kabupaten terkait alokasi anggaran, serta melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala. Kedua narasumber sepakat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada keberlangsungan upaya-upaya tersebut. Dengan memperhatikan upaya-upaya yang ada diharapkan Pantai Watu Pajung dan Danau Rana Tonjong dapat menjadi destinasi wisata yang semakin menarik, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

- **Melakukan Perencanaan Terhadap Pariwisata**

Dalam pengelolaan kawasan pariwisata yaitu Pantai Watu Pajung, pada awal Tahun 2016, Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur sudah mulai masuk dan melakukan survey lokasi guna untuk melaksanakan program yang sudah mereka rancang. Pada pertengahan Tahun 2016 melalui Pemerintah Desa Nanga Mbaur, Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur mulai membentuk kelompok. Kelompok yang dibentuk saat itu adalah kelompok sadar wisata dan kelompok untuk melakukan usaha penjualan di kawasan Pantai Watu Pajung. Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur telah melakukan survei terhadap potensi wisata Danau Rana Tonjong dan mengidentifikasi kebutuhan untuk membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang melibatkan masyarakat Desa Nanga Mbaling. Meskipun secara administratif Danau Rana Tonjong berada di wilayah Desa Nanga Mbaling, namun sejak awal sampai pariwisata tersebut di atur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten

Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2016, pengelolaan kawasan wisata ini dilakukan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Jadi, dalam hal pengelolaan destinasi wisata Danau Rana Tonjong tersebut, pihak Pemerintah Desa Nanga Mbaling tidak terlibat sepenuhnya, baik dalam perencanaan, promosi dan pelaksanaan.

- Melakukan Pengelolaan Terhadap Destinasi Wisata

Kabupaten Manggarai Timur yang merupakan salah satu Kabupaten di Nusa Tenggara Timur, yang memiliki banyak destinasi pariwisata berpotensi akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan Daerah. Hal ini tentu menjadi pusat perhatian secara khusus dari Pemerintah Daerah. pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata Pantai Watu Pajung dan Danau Rana Tonjong sudah dilakukan secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan kebijakan yang telah dirancang, namun keterlibatan masyarakat setempat juga sangat penting untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam pengelolaan destinasi wisata Pantai Watu Pajung dan Danau Rana Tonjong. Akan tetapi sejak Wisata Pantai Watu Pajung dan Danau Rana Tonjong ditetapkan sebagai objek wisata, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata tersebut sangat terbatas.

- Melakukan Sosialisasi Pariwisata

Sejak ditetapkannya sebagai destinasi wisata, pada tahun 2016, 2017, dan 2018, Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur sempat melakukan sosialisasi terkait pengelolaan Pantai Watu Pajung, seperti: sosialisasi tentang kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola dan melestarikan destinasi wisata, dan juga sosialisasi tentang cara mengelola destinasi wisata, dan cara menyambut wisatawan. Namun setelah tahun 2018, kegiatan sosialisasi ini terhenti. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan Dinas Pariwisata sangat terbatas. Hanya dilakukan 2 sampai 3 kali dalam setahun, dan itu pun tidak berkelanjutan. Sosialisasi terkait pengelolaan Danau Rana Tonjong yang dilakukan Dinas Pariwisata terakhir kali pada tahun 2021. Setelah itu, tidak ada lagi kegiatan sosialisasi meskipun Danau Rana Tonjong ini telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Melakukan Pembinaan dan Pengawasan

Model Pembinaan dan Pengawasan Pariwisata Pantai Watu Pajung dan Pariwisata Danau Rana Tonjong itu sama. Hal ini karena Kawasan Pantai Watu Pajung dan Danau Rana Tonjong diatur secara khusus dalam satu peraturan daerah (PERDA)

Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kawasan Pantai Watu Pajung dan Danau Rana Tonjong. Secara keseluruhan, upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan menunjukkan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kualitas wisata, dan melibatkan Masyarakat dalam pengelolaan wisata, meskipun kegiatan pembinaan dan peng-awasan tersebut masih banyak tantangan, kendala sehingga tidak berjalan dengan lancar serta tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.

Faktor Penghambat Fungsi Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Watu Pajung Dan Danau Rana Tonjong Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kawasan Pariwisata Pantai Watu Pajung Dan Danau Rana Tonjong.

- Sumber Daya Manusia (SDM)

Analisis terhadap latar belakang pendidikan sumber daya manusia (SDM) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan bahwa secara umum tingkat pen-didikan para pegawai cukup tinggi, didominasi oleh lulusan S1 dari berbagai disiplin ilmu. Keberagaman latar belakang pendidikan ini mengindikasikan potensi yang besar untuk pengembangan berbagai aspek pariwisata. Namun, perlu diperhatikan bahwa hanya sebagian kecil pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan langsung di bidang par-iwisata. Hal ini menjadi suatu tantangan, mengingat pentingnya pemahaman mendalam tentang konsep-konsep dasar pariwisata dalam pengelolaan destinasi wisata yang efektif. Lulusan sarjana pariwisata umumnya memiliki pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai perencanaan destinasi, manajemen hotel, pemasaran pariwisata, dan pengembangan produk wisata. Meskipun demikian, upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Manggarai Timur, khususnya di kawasan Pantai Watu Pajung dan Danau Rana Tonjong, telah menunjukkan progres yang baik namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM, terutama dalam hal pengetahuan dan keterampilan spesifik terkait pariwisata.

Analisis terhadap tingkat pendidikan Masyarakat Desa Nanga Mbaur menunjukkan adanya disparitas yang cukup signifikan. Meskipun terdapat jumlah penduduk yang cukup tinggi dengan tingkat pendidikan SMA ke atas, namun proporsi penduduk dengan tingkat pendidikan dasar (SD) dan di bawahnya masih cukup besar. Hal ini mengindikasikan adanya potensi yang belum tergali secara optimal dalam pengembangan pariwisata di Desa ini. Meskipun pemerintah Desa telah berupaya

mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata Pantai Watu Pajung melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), respon Masyarakat masih terbilang kurang optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam hal pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan. Pengembangan Wisata Pantai Watu Pajung terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kawasan wisata. Data menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk cukup banyak, namun jumlah penduduk dengan pendidikan tinggi yang relevan dengan pariwisata masih terbatas.

Meskipun pengelolaan Danau Rana Tonjong secara keseluruhan tidak melibatkan pemerintah Desa dan Masyarakat secara langsung, namun Masyarakat diberi kesempatan untuk mengembangkan usaha di sekitar kawasan tersebut. Pemerintah Desa Nanga Mbalang secara aktif mendorong Masyarakat untuk memanfaatkan peluang ini dan menjaga kelestarian lingkungan Danau Rana Tonjong agar tetap menarik bagi pengunjung. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur, khususnya Dinas Pariwisata, belum sepenuhnya melibatkan pemerintah Desa dan masyarakat dalam pengelolaan Danau Rana Tonjong. Kesenjangan dalam hal pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat upaya pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Jadi, dari segi sumber daya manusia belum memadai untuk mengelola destinasi wisata.

- **Sarana dan Prasarana**

Secara umum, ketersediaan sarana dan prasarana di kedua kawasan wisata tersebut dapat dikatakan sudah cukup memadai untuk tahap awal pengembangan. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk mengembangkan potensi wisata di kedua kawasan tersebut, diperlukan peningkatan yang signifikan pada aspek sarana dan prasarana. Hal tersebut selaras dengan fungsi Dinas Pariwisata dalam melakukan perencanaan, sehingga Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur dituntut untuk dapat melakukan perencanaan yang efektif guna mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. beberapa langkah untuk mengatasi kendala dalam pengembangan pariwisata Pantai Watu Pajung dan Danau Rana Tonjong. Salah satu langkah yang akan segera dilakukan adalah penyediaan fasilitas yang lebih lengkap untuk memenuhi kebutuhan pengunjung, seperti tempat parkir, toilet, dan gazebo. Selain itu, Dinas Pariwisata juga akan berupaya untuk mempercepat proses penyambungan listrik PLN ke kedua kawasan wisata tersebut.

Dengan adanya listrik, diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung dan membuka peluang untuk pengembangan fasilitas yang lebih modern.

- Ketidaktahuan Masyarakat Mengenai Pariwisata

Meskipun kedua destinasi wisata ini telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kawasan Pantai Watu Pajung dan Danau Rana Tonjong. Kesadaran Masyarakat tentang keberadaan dan potensi kedua tempat tersebut masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya Masyarakat, termasuk yang tinggal di sekitar lokasi, yang belum mengetahui keberadaan Pantai Watu Pajung dan Danau Rana Tonjong. Padahal, jika Masyarakat lebih peduli, mereka dapat berperan aktif dalam mempromosikan dan menjaga kelestarian kedua destinasi wisata tersebut. terungkap beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran Masyarakat tentang potensi wisata Pantai Watu Pajung dan Danau Rana Tonjong. Kepala Desa Nanga Mbaur menyoroti kurangnya promosi yang efektif, terutama melalui media sosial, sebagai faktor utama.

- Anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Manggarai Timur, termasuk Pantai Watu Pajung dan Danau Rana Tonjong. Alokasi anggaran yang relatif sama untuk setiap destinasi wisata serta kurangnya dukungan anggaran yang spesifik untuk pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan kedua destinasi wisata tersebut menjadi tantangan tersendiri. Meskipun demikian, Bapak Rofinus menyampaikan bahwa Dinas Pariwisata terus berupaya untuk meningkatkan alokasi anggaran guna mendukung pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan Pantai Watu Pajung dan Danau Rana Tonjong adalah dengan mengajukan usulan kepada Pemerintah Daerah agar dialokasikan anggaran yang lebih besar.

Dengan adanya tambahan anggaran, diharapkan dapat dilakukan pembangunan dan perbaikan fasilitas serta sarana prasarana yang ada di kedua destinasi wisata tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Masyarakat sekitar. Keterbatasan anggaran dan kurangnya dukungan pemerintah merupakan kendala utama dalam pengembangan pariwisata Pantai Watu Pajung dan Danau Rana Tonjong. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah, serta keterlibatan aktif dari Masyarakat setempat. Dengan adanya dukungan yang memadai,

potensi wisata di kedua kawasan tersebut dapat dikembangkan secara optimal dan memberikan manfaat bagi Masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur dalam pengelolaan wisata Watu Pajung dan Danau Rana Tonjong berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang pengelolaan Kawasan Pariwisata Pantai Watu Pajung dan Danau Rana Tonjong, meliputi: Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata, Melakukan perencanaan terhadap pariwisata, Melakukan pengelolaan terhadap destinasi wisata, Melakukan sosialisasi pariwisata, dan Melakukan pembinaan dan pengawasan. Faktor penghambat fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur dalam pengelolaan wisata Watu Pajung dan Danau Rana Tonjong berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang pengelolaan Kawasan Pariwisata Pantai Watu Pajung dan Danau Rana Tonjong, meliputi: Sumber daya manusia (SDM), Sarana dan Prasarana. Ketidaktahuan Masyarakat mengenai pariwisata, dan Anggaran sehingga dapat dikembangkan secara optimal dan memberikan manfaat.

Saran

Pemerintah Daerah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan kedua destinasi wisata melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas, serta Peningkatan Promosi dan Pemasaran. diharapkan pengelolaan destinasi wisata Pantai Watu Pajung dan Danau Rana Tonjong dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kunjungan wisatawan, peningkatan pendapatan Masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

DAFTAR REFERENSI

- Devison, R. A., Tyesta, L., & Herawati, R. (2017). Tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi dalam pengelolaan objek wisata. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–16.
- Hamdan, H., Lestanata, Y., & Amil, A. (2021). Analisis peran Dinas Pariwisata dalam kegiatan promosi pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 1(2), 86–99.

- Jurnal flores.co.id. (n.d.). *Review wisata alam Rana Tonjong hingga Watu Pajung di Manggarai Timur NTT*. Diakses dari <https://www.jurnal flores.co.id/travel/7768379810/review-wisata-alam-rana-tonjong-hingga-watu-pajung-di-manggarai-timur-ntt>
- Monteiro, J. M. (2023). *Metode penelitian dan penulisan hukum* (hlm. 43). Malang: Setara Press.
- Muda, I., & Angelia, N. (2018). Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengelola sektor pariwisata pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat. [Informasi jurnal atau penerbit tidak tersedia – mohon dilengkapi].
- Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. (2015). *Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015–2025*.
- Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kawasan Pariwisata Pantai Watu Pajung dan Rana Tonjong*.
- Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. (2022). *Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur*.
- Pratiwi, N. (2020). *Analisis pengelolaan objek wisata Puncak Cemara Kota Sawahlunto* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Rohmawati, E. (2016). *Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2014 tentang standar usaha pondok pariwisata pada syariah guest house perspektif masalah: Studi syariah guest house di Malang* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Serang, R. P., Singkoh, F., & Kairupan, J. (2018). Pengelolaan objek wisata Pantai Baliranggeng oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Sripambudi, G. I., Hilman, Y. A., & Triono, B. (2020). Strategi Dinas Pariwisata dalam pengembangan infrastruktur objek wisata Telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 38–50.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.